



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 571 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : *a.* bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- b.* bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 16);

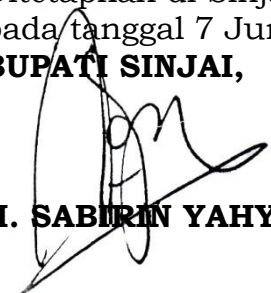
26. Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 1574 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepala SKPD selanjutnya menetapkan Rencana Kerja SKPD setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 7 Juni 2018
BUPATI SINJAI,


H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Bulu – bulu Barat No. 1 Telp. (0482) 21131 Fax.(0482) 21505 Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 571 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);

26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 16);
27. Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 1574 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 4 Juni 2017



KEPALA BAPPEDA,

Des ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD	50
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	50
4.3 Rencana Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja dan Pelayanan SKPD	21
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	25
Tabel 3.1	Prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional serta arah kebijakan Nasional Tahun 2018	38
Tabel 3.2	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2017 Berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018	41
Tabel 3.3	Rencana Progam dan Kegiatan Prioritas BAPPEDA Kabupaten Sinjai.....	43

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-Nya maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 dapat terselesaikan. Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan tahun ke lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja SKPD BAPPEDA tahun 2018 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai. Disamping itu, diharapkan dokumen Renja SKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Kinerja sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Sinjai, 4 Juli 2017

KEPALA BAPPEDA,



DR. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja SKPD serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan tahun ke empat yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Tahun 2013 – 2018, yang mana penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018, agar didalam pelaksanaan progam/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
 26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
 27. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 38);
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);

30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58;
31. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 22);
32. Keputusan Bupati Nomor 550 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuannya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah, serta sebagai penjabaran atas implementasi dari visi dan misi Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sinjai.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Sinjai Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penyusunan dokumen Renja SKPD, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen Renja SKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja SKPD Kabupaten Sinjai tahun 2018.

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
	Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan dokumen Renja SKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
BAB VI	PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Bappeda tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan ditetapkan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dan sebagai bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan tersebut.

Fokus utama pelaksanaan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Sinjai ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai, dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung terkait urusan SKPD dan Belanja Langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran	%
				Anggaran	Realisasi		
1			2	3	4	5	6
5	1		Belanja Tidak Langsung	1,477,262,902,00	1.394.757.465,00	82.505.437,00	94,58
5	1	1	Belanja Pegawai	1.125.890.000,00	1.074.505.000,00	51.385.000,00	95
5	2		Belanja Langsung	5,789,171,700,00	5,477,699,331,00	311,472,369,00	94,62
5	2	1	Belanja Pegawai	1,125,890,000,00	1,074,505,000,00	51,385,000,00	99,39
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,224,281,700,00	3,967,691,381,00	256,590,319,00	97,34
5	2	3	Belanja Modal	439,000,000	435,502,950,00	3,497,050,00	93,45
JUMLAH				7.266.434.602,00	6.872.456.796,00	393.977.806,00	94,58

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

BAPPEDA Kabupaten Sinjai

No.	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
								Target	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2			2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	3.01	1	1	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan adminitrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	100%	100%	100%	100%		
1			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan mineral	Waktu penyedia Jasa komunikasi dan listrik	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	36	-
2			6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang di sediakan jasa Pemeliharaan dan perizinan	-	20 Unit	17 Unit	14 Unit	82,35	17 unit R2	51	-
3			8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36	-

4			12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen isntalasi listrik /penerangan bangunan kantor	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	48	-
5			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	48	-
6			19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah pelayanan adminitrasi kesekretariatan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	24	-
7			20	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan adminitrasi keuangan	-	0	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	36	-
8			22	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsulitasi ke luar daerah	-	1 Paket	-	-	-	12 bulan	12	-
					-	-	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	24	-	
2	3.01	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	100 %	100,00	100 %		
9			7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di sediakan	-	9 Unit	1 Unit AC	1 Unit AC	100,00	2 Unit AC	2	-
10			9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	-	14 Unit	-	-	-	14 unit	14	-
						-	-	1 Unit Printer	1 Unit Printer	100,00	2 Unit Printer	3	-
						-	-	1 Unit LCD	1 Unit LCD	100,00	-	1	-
						-	-	1 Laptop	1 Laptop	100,00	-	1	-
						-	-	-	-	-	2 Unit Komput er PC	2	-

						-	-	-	-	-	1 Unit Scanner	1	-
11			10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah dan jenis meubeler yang di sediakan	-	19 Unit	-	-	-	1 unit	1	-
						-	-	18 Buah kursi rapat	18 Buah kursi rapat	100,00	-	18	-
12			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	-	1 Unit	-	-	-	1 unit	1	-
13			24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	-	19 Unit	-	-	-	17 unit	15	-
						-	-	15 unit R 4	15 unit R2	100,00	15 unit R2	30	-
						-	-	2 unit R2	2 unit R4	100,00	2 unit R4	4	-
14			26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	-	-	5 Unit AC	5 Unit AC	100,00	12 Unit AC	12	-
15			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor	-	-	4 Unit PC	-	-	10 unit	10	-
16			31	Pengadaan Instalasi Air	jumlah instalasi air yang diadakan						1 unit	1	
17			45	Penambahan Daya Listrik	jumlah penambahan daya listrik yang diadakan						1 unit	1	
3	3.01	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur		75 %	100 %	100 %	100,00	100 %		
18			2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang diadakan	-	-	45 Pasang	43 pasang	95,56	46 psg	46	-
4	3.01	5		Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100 %	100 %	100 %	100,00	100 %		

19			1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan formal	-	-	-	-	-	1 org perempuan	1	-
20			3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	1 Kali	-	-	-	16 org	16	-
						-	-	6 Orang	5 Orang	83,33	8 Org	13	-
5	3.01	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	100 %	100 %		100 %		
21			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja Bappeda tahun 2017						1 dok	1	
22			4	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokum en	100,00	1 dok	1	-
23			9	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen RKA, DPA dan DPPA SKPD tahun 2015 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	-	-	-	-	-	6 dok	6	-
6	3.01	15		Program Pengembangan data/Informasi	Terwujudnya pengembangan data dan informasi yang valid	-		100 %	100 %	100,00	100 %		
24			12	Pengelolaan Website	Website BAPPEDA Kab. Sinjai	-	-	1 Paket	1 Paket	100,00	12 bulan	12	-
7	3.01	18		Program perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya pengembangan wilayah melalui perencanaan tata ruang wilayah		100 %	80 %	80 %	100,00	80 %		

25			9	Koordinasi evaluasi perencanaan ruang daerah (KEPRD) kabupaten sinjai	Laporan pelaksanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang						2 Lap	2	
26			10	Penyusunan KLHS dokumen perencanaan	Jumlah dokumen KLHS, RPJPD dan RPJMD						1 dok	1	
27			11	Review RTRW Provinsi Substansi Kehutanan	Jumlah laporan kajian revisi kawasan hutan dalam review RTRWP Sulsel di Kab. Sinjai						1 dok	1	
8	1.06	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar		100 %	100 %	100 %	100,00	100 %		
28			17	Updating implementasi pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) program PPSP	review dokumen perencanaan bidang sanitasi dan permukiman						2 jenis	2	
29			18	Fasilitasi Pokja Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS III)	Dokumen perencanaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi 2018						1 dok		

9	1.06	21		Program Perencanaan Pembangunan daerah	Terwujudnya ketaatan dan pemenhan ptrosedur perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur		-	100 %	100 %	100,00	100 %		
30			1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPD	-	-	80 Desa	80 Desa	100,00	-	80	-
						-	-	9 Kec	9 Kec	100,00	-	9	-
						-	-	1 Kab	1 Kab	100,00	-	1	-
						-	-	-	-	-	1 Dok	1	-
31			13	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah	Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	4 Kali	-	-	-	-	-	-
					Dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah	15 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokum en	100,00	0 Dok	4	33,33
					Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2017, dokumen monitoring pembangunan tahun 2017, draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	-	-	-	-	-	3 Dok	3	-

32			28	Penyelenggaraan forum gabungan SKPD	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrastruktur	-	-	-	-	-	3 Dok	3	-
33			29	Penyusunan perubahan RKPD dan Penyusunan rancangan RKPD Kab. Sinjai	dokumen RKPD tahun 2018 dan dokumen RKPD perubahan tahun 2017	5 Dokumen	1 Tahun	-	-	-	2 dok	2	-
34			30	Penyusunan kebijakan umum APBD/PPAS perubahan dan kebijakan Umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai	Terlaksananya penyusunan dokumen KUA/PPAS perubahan tahun 2016 dan KUA/PPAS Tahun 2017	-	2 Dokumen	-	-	-	2 dok	2	-
35			31	Updating sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD)	Sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah						1 SIM	1	
36			32	fasilitasi revisi dokumen perencanaan	memfasilitasi revisi dokumen perencanaan						4 jenis	4	
37			33	koordinasi perencanaan, penganggaran pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah	terlaksananya sinkronisasi antara pembangunan daerah, provinsi dan pusat						1 thn	1	
10	1.06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi		-	100 %	100 %	100,00	100 %		

38			18	Penyusunan perencanaan pengembangan potensi ekonomi lokas Kab. Sinjai tahun 2017	dokumen potensi pengembangan ekonomi kabupaten Sinjai tahun 2017						1 dok	1	
11	1.06	23		Program Perencanaan Sosial Pemerintahan	Tingkat Keterkoordinasian bidang sosial dan budaya		1 Tahun	100 %	100 %	100,00	100 %		
39			3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan	Koordinasi perencanaan SKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan, proposal APBN, Proposal DAK	-	1 Paket	-	-	-	1 thn	1	-
40			5	Fasilitasi penyelenggaraan pembina kabupaten/kota sehat tahun 2017	Dokumentasi Program kabupaten Sehat Tahun 2017	-	-	-	-	-	1 dok	1	-
41			6	Fasilitasi percepatan program penanggulangan kemiskinan	laporan pelaksanaan penanggulangan daerah (LP2KD) dan Laporan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), pemetaan sebaran penduduk miskin tahun 2017						3 dok	3	
42			7	Perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan dan desa						2 dok	2	
43			8	Penyusunan rencana aksi daerah (RAD- TB)	dokumen rencana aksi daerah, pengendalian Tuberculosis tahun 2016-2020						1 dok	1	

44			9	Fasilitasi Program pengusutan gender (PUG)	laporan data terpilah PUG dan PA evaluasi PPRG dan usulan musrenbang anak dan perempuan tahun 2017						4 lap	4	
12	1.06	24		Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya dan infrastruktur ekonomi		100 %	100 %	100 %	100,00	100 %		
45			6	Koordinasi Bidang SDA dan Prasarana Wilayah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil	-	12 Lap	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 bulan	9	-
46			7	Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen Proposal Anggaran DAK Tahun 2016 dan laporan bulanan pelaksanaan tahun 2015	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	1 dok	1	-
						-	40 Exemplar	40 Exemplar	40 Exemplar	100,00	-	40	-
47			15	Review RPIJM kabupaten sinjai	Terlaksananya laporan review RPIJM keciptakarya beserta program perencanaan keciptakarya jangka menengah Kabupaten Sinjai	5 Dokumen	2 Kali	-	-	-	-	-	-
					Dokumen perencanaan investasi keciptanya beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptaannya								

					Kabupaten Sinjai	-	-	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1	-
48				Koordinasi perencanaan dan monitoring evaluasi dana alokasi khusus (DAK)	Dokumen perencanaan dana alokasi khusus tahun 2017 dan dokumen evaluasi pelaksanaan DAK tahun 2016	-	-	-	-	-	2 Dok	2	-
13	1.06	25		Program Pengembangan data/Informasi/statistik daerah	Terlaksananya laporan review rencana tata ruang wilayah						100 %		
49			1	Sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD dan Profil daerah Kab. Sinjai tahun 2016 berdasarkan permendagri no 8 tahun 2014 dan permendagri no. 54 tahun 2010	-	-	-	-	-	2 Dok	2	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 26 urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
2. Pasal 11, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
3. Pasal 12, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
4. Pasal 14, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah;
5. Pasal 15, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
6. Pasal 16, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
7. Pasal 18 , ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RPJM Daeeah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Mennegah Daerah;
8. Pasal 20, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;

9. Pasal 21, ayat (4) : Kepala BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD;
10. Pasal 22, ayat (4) : Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD;
11. Pasal 24, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang;
12. Pasal 28, ayat (2) : Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembanguann dari masing - masing SKPD;
13. Pasal 29, ayat (3) : Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil dan 18 (delapan belas) orang Pegawai Sukarela. Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi berbagai permasalahan terkait usulan program dan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya.

Dalam perkembangan BAPPEDA kedepannya diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA	%	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Persentase ketersediaan data perencanaan kabupaten dalam aplikasi SIPD.	%	80	90	93	95	80	90	93	95	
3	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD.	%	90	-	-	90	90	-	-	90	
4	Persentase pemanfaatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dalam dokumen RKPD.	%	78	80	90	95	78	80	90	95	
5	Persentase pemanfaatan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan dalam dokumen RKPD.	%	78	80	80	95	74	80	80	95	
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yan diakomodir dalam APBD	%	60	80	80	80	60	80	80	80	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan dan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Optimalisasi *partnership* dengan tenaga tenaga perencana eksternal.
3. Optimalisasi tingkat efektivitas pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan Daerah.
4. Perlunya peningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan Daerah. Daftar usulan hasil Musrenbang baik dari tingkat desa hingga ke Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana Kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat hal disebabkan karena keterbatasan dana Pemerintah, sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting dan karenanya masyarakat pun merasa dikesampingkan.
5. Belum updatenya data makro sebagai pendukung penyusunan perencanaan.
6. Usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD masih berupa daftar panjang dikarenakan usulan tersebut tidak sepenuhnya mengacu pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan serta masih adanya ego sektoral dari para pemangku kepentingan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Selain permasalahan tersebut di atas, BAPPEDA menghadapi tuntutan yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan pembangunan akan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan prinsip - prinsip perencanaan: *specific* (memiliki tujuan tertentu), *measurable* (dapat diukur), *achieveable* (dapat dicapai), *reasonable* (memiliki alasan) dan *timelines* (ada jangka waktu kapan akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, BAPPEDA pun didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai upaya pendekatan dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang - undangan

yang semakin lengkap maka tantangan tersebut maka tuntutan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat terpenuhi.

Dalam perkembangan BAPPEDA kedepannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mewujudkan perencanaan berkualitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Melakukan proses koordinasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berada dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan; Pusat penelitian dan pengembangan, hal ini diperlukan agar pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan untuk mendorong percepatan pencapaian pembangunan di berbagai bidang sehingga dapat lebih optimal, berdayaguna, efektif dan efisien dengan memanfaatkan semua sumber - sumber pembangunan.

Adapun strategi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memperluas wawasan dalam bidang perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan pengendalian yang koordinatif transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar SKPD, Pemerintah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perbaiki metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsif dan partisipatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2018. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	BAPPEDA Sinjai	100%	807.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	BAPPEDA Sinjai	100%	675,704,400	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	51.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	68,400,000	Revisi pagu
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	BAPPEDA Sinjai	11 Unit	10.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	BAPPEDA Sinjai	11 Unit	7,750,000	Revisi pagu & target
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	7.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	16,250,000	Revisi pagu
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	11,400,000	Revisi pagu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPPEDA Sinjai	13 Bulan	6.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPPEDA Sinjai	13 Bulan	13,880,000	Revisi pagu
6	Pelayanan administrasi kesekretariatan	Waktu pengelolaan administrasi kesekretariatan	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	80.000.000	Pelayanan administrasi kesekretariatan	Waktu pengelolaan administrasi kesekretariatan	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	114,272,500	Revisi pagu
7	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	150.000.000	Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	146,080,000	Revisi pagu
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	500.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	297,671,900	Revisi pagu
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	BAPPEDA Sinjai	100%	165.500.000	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	BAPPEDA Sinjai	100%	349,400,000	
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	AC : 3 unit, CCTV : 1 unit, Kursi kerja : 7 buah	10.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	Lemari kerja : 1 unit, Lemari Arsip : 4 unit, AC : 3 Unit	103,300,000	Revisi pagu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	Komputer/P C : 3 unit, Laptop : 2 unit, Printer 4 unit, UPS : 1 unit	55.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	Komputer/P C : 3 Unit, Laptop : 2 Unit, Printer : 4 Unit, UPS : 1 Unit, CCTV : 1 unit	100,300,000	Revisi pagu
11	Pengadaan Meubeler	Jumlah dan jenis Meubeler yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	2 unit lemari arsip	90.000.000	Pengadaan Meubeler	Jumlah dan jenis Meubeler yang diadakan	BAPPEDA Sinjai	7 buah kursi kerja	14,300,000	Revisi pagu & target
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BAPPEDA Sinjai	1 unit	4.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BAPPEDA Sinjai	1 unit	40,000,000	Revisi pagu & target
13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BAPPEDA Sinjai	R2:9 Unit,R4 :2 unit	6.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BAPPEDA Sinjai	R2 : 11 Unit, R4 : 2 Unit	67,000,000	Revisi pagu & target
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	BAPPEDA Sinjai	AC : 15 Unit	16,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	BAPPEDA Sinjai	AC : 23 Unit	11,250,000	Revisi pagu
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BAPPEDA Sinjai	PC : 11 unit, Laptop : 14 Unit	15,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BAPPEDA Sinjai	PC : 11 Unit, Laptop : 14 Unit	13,250,000	Revisi pagu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BAPPEDA Sinjai	100%	65,500,000	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BAPPEDA Sinjai	100%	103,346,000	
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja BAPPEDA	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	45,500,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja BAPPEDA	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	12,403,000	Revisi pagu
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	20,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	15,123,000	Revisi pagu
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran SKPD	Evaluasi Renja, Renja Thn berikut, Perubahan Renja Thn Berjalan, RKA dan DPA thn Berikut, DPPA tahun berjalan, Renstra	BAPPEDA Sinjai	6 Dokumen	65.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran SKPD	Evaluasi Renja, Renja Thn berikut, Perubahan Renja Thn Berjalan, RKA dan DPA thn Berikut, DPPA tahun berjalan, Renstra	BAPPEDA Sinjai	6 Dokumen	75,820,000	
IV	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Adanya RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD yang berbasis Perbup yang sesuai Kalender Perencanaan	BAPPEDA Sinjai	100%	915,500,000	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Adanya RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD yang berbasis Perbup yang sesuai Kalender Perencanaan	BAPPEDA Sinjai	100%	1,372,023,000	Revisi pagu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPD	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	600,000,000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPD	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	550,951,000	
20	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai, dokumen monitoring pembangunan, dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	Kab. Sinjai	3 Dokumen	75,500,000	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai, dokumen monitoring pembangunan, dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	Kab. Sinjai	3 Dokumen	141,725,000	
21	Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrastruktur	Kab. Sinjai	1 Dokumen	25,000,000	Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD, bidang sosial, bidang ekonomi dan infrastruktur	Kab. Sinjai	1 Dokumen	81,621,000	Revisi pagu
22	Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	Dokumen perubahan RKPD 2018 Kab. Sinjai dan rancangan RKPD 2019 Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	2 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	Dokumen perubahan RKPD 2018 Kab. Sinjai dan rancangan RKPD 2019 Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	2 Dokumen	121,231,000	Revisi pagu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS 2018 Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS 2019 kabupaten Sinjai	Dokumen kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	2 Dokumen	90,000,000	Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS 2018 Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS 2019 kabupaten Sinjai	Dokumen kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	2 Dokumen	67,110,000	Revisi pagu & program
24	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Update SIPPD	Kantor BAPPEDA	1 SIM	540.000.000	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Update SIPPD	Kantor BAPPEDA	1 SIM	319,940,000	
25	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Kantor BAPPEDA	1 Dokumen	95.000.000	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Kantor BAPPEDA	1 Dokumen	89,445,000	
V	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya kinerja pengembangan wilayah melalui perencanaan tata ruang wilayah	Kab. Sinjai	100%	985,000,000	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya kinerja pengembangan wilayah melalui perencanaan tata ruang wilayah	Kab. Sinjai	100%	799,912,800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten Sinjai (BKPRD)	Laporan Pelaksanaan Pentaaan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang	Luar dan Dalam Provinsi	2 Laporan	125,000,000	Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten Sinjai (BKPRD)	Laporan Pelaksanaan Pentaaan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang	Luar dan Dalam Provinsi	2 Laporan	69,279,000	
27	Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	KLHS Dokumen Perencanaan	Kantor BAPPEDA	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	KLHS Dokumen Perencanaan	Kantor BAPPEDA	1 Dokumen	204,926,000	
28	Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Laporan kajian revisi kawasan hutan dalam Review RTRWP Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai	Kantor BAPPEDA	1 Laporan	100,000,000	Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Laporan kajian revisi kawasan hutan dalam Review RTRWP Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai	Kantor BAPPEDA	1 Laporan	129,280,000	
29	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Kantor BAPPEDA	1 Dokumen	70,000,000	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL)	Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan		1 Dokumen	50,379,800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2032	Laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	590000000	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2032	Laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai	BAPPEDA Sinjai	1 Laporan	346,048,000	
VI	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar	BAPPEDA		120,000,000	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar	BAPPEDA		65,196,000	
31	Updating Implementasi Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi kabupaten (SSK) pelaksanaan Program Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Review dokumen perencanaan bidang sanitasi permukiman	BAPPEDA	1 Dokumen	50,000,000	Updating Implementasi Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi kabupaten (SSK) pelaksanaan Program Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Review dokumen perencanaan bidang sanitasi permukiman	BAPPEDA	1 Dokumen	35,673,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Koordinasi Perencanaan Pokja Air Minum dan Peyehatan Lingkungan (AMPL) Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS III)	Dokumen perencanaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi	BAPPEDA	1 Dokumen	70,000,000	Koordinasi Perencanaan Pokja Air Minum dan Peyehatan Lingkungan (AMPL) Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS III)	Dokumen perencanaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi	BAPPEDA	1 Dokumen	29,523,000	
VII	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	BAPPEDA Sinjai	100%	345,000,000	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	BAPPEDA Sinjai	100%	409,853,700	
33	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	120,000,000	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil	BAPPEDA Sinjai	12 Bulan	239,297,700	Revisi pagu & target
34	Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	pelaksanaan Koordinasi dalam Perencanaan DAK 2018	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	100,000,000	Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	pelaksanaan Koordinasi dalam Perencanaan DAK 2018	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	143,470,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Review RPIJM Kabupaten Sinjai	Dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan kab. Sinjai tahun 2017-2022	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	125,000,000	Review RPIJM Kabupaten Sinjai	Dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan kab. Sinjai tahun 2017-2022	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	27,086,000	
VIII	Program Perencanaan sosial pemerintahan	Tingkat keterkoordinasian bidang sosial dan pemerintahan	BAPPEDA Sinjai	100%	660,000,000	Program Perencanaan sosial pemerintahan	Tingkat keterkoordinasian bidang sosial dan pemerintahan	BAPPEDA Sinjai	100%	575,487,100	
36	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan	Dokumen monitoring dan pengendalian, pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	BAPPEDA Sinjai	12 bulan	100,000,000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan	Dokumen monitoring dan pengendalian, pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	BAPPEDA Sinjai	12 bulan	94,535,000	
37	Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai Tahun 2018	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2018, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2018	BAPPEDA Sinjai	1 laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai Tahun 2018	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2018, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2018	BAPPEDA Sinjai	1 laporan	127,173,000	Revisi pagu & target

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan	BAPPEDA Sinjai	2 Dokumen	180,000,000	Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan	BAPPEDA Sinjai	2 Dokumen	166,935,100	Baru
39	Perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	150,000,000	Perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	BAPPEDA Sinjai	1 Dokumen	115,379,000	
40	Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak.	BAPPEDA Sinjai	1 Paket	80,000,000	Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak.	BAPPEDA Sinjai	1 Paket	71,465,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Program pengembangan Data / Informasi/statistik daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan			85,000,000	Program pengembangan Data / Informasi/statistik daerah	Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan			81,597,000	
41	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD dan Profil Daerah	Bappeda Sinjai	2 Dokumen	85,000,000	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen SIPD dan Profil Daerah	Bappeda Sinjai	2 Dokumen	81,597,000	Revisi pagu & target

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Sinjai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2013 – 2018 dan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018, maka ditetapkan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 ***“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”***. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan serta arah kebijakan nasional tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Arah Kebijakan Nasional

Tahun 2018

Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
- V. KETAHANAN ENERGI
 13. EBT dan Konservasi Energi
 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
- VI. KETAHANAN PANGAN
 15. Peningkatan Produksi pangan
 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
- VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN
 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
- IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 23. Pembangunan Perdesaan
 24. Reforma Agraria
 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
 26. Percepatan Pembangunan Papua
- X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
 27. Penguatan Pertahanan
 28. Stabilitas Politik dan Keamanan
 29. Kepastian Hukum
 30. Reformasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana kerja didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara tetrukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang. Adapun target tujuan dan sasaran tahun 2018 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2018

Berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2018
Meningkatkan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.	Kualitas dokumen perencanaan tiga terbaik provinsi.	Persentase pemanfaatan data dan informasi perencanaan kabupaten dalam dokumen perencanaan.	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.	Persentase ketersediaan data perencanaan kabupaten dalam aplikasi SIPD.	93%
		Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD.	90%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2018
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang mengakomodir partisipasi berbagai stakeholder.	Peningkatan partisipasi aktif dalam implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam APBD	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan visi Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 **“Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”** dan sesuai dengan visi Bappeda Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel Mendukung Akselerasi Pembangunan”**, maka 9 program dan 41 kegiatan dalam rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018 dengan anggaran Rp. 4.432.520.000,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rencana Progam dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Sinjai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bappeda Kab. Sinjai	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	675,704,400	712,000,000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan listrik	12 Bulan	68,400,000	70,000,000	Sedang berjalan
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 Unit	7,750,000	9,000,000	Sedang berjalan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	16,250,000	18,000,000	Sedang berjalan
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11,400,000	13,000,000	Sedang berjalan
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	13 Bulan	13,880,000	14,000,000	Sedang berjalan
6	Pelayanan administrasi kesekretariatan	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu pengelolaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	114,272,500	118,000,000	Sedang berjalan

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
7	Pengelolaan keuangan SKPD	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	146,080,000	150,000,000	Sedang berjalan
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bappeda Kab. Sinjai	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	297,671,900	320,000,000	Sedang berjalan
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Bappeda Kab. Sinjai	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	349,400,000	434,000,000	
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	AC : 3 unit, CCTV : 1 unit, Kursi kerja : 7 buah	103,300,000	150,000,000	Sedang berjalan
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Komputer/PC : 3 unit, Laptop : 2 unit, Printer 4 unit, UPS : 1 unit	100,300,000	120,000,000	Sedang berjalan
11	Pengadaan Meubeler	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah dan jenis Meubeler yang diadakan	2 unit lemari arsip	14,300,000	25,000,000	Sedang berjalan
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	40,000,000	42,000,000	Sedang berjalan
13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	R2:9 Unit,R4 :2 unit	67,000,000	68,000,000	Sedang berjalan
14	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	AC : 15 Unit	11,250,000	14,000,000	Sedang berjalan

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	PC : 11 unit, Laptop : 14 Unit	13,250,000	15,000,000	Sedang berjalan
III	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Bappeda Kab. Sinjai	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	103,346,000	106,000,000	
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Kinerja BAPPEDA	1 Laporan	12,403,000	13,000,000	Sedang berjalan
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda Kab. Sinjai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	15,123,000	17,000,000	Sedang berjalan
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran SKPD	Bappeda Kab. Sinjai	Evaluasi Renja, Renja Thn berikut, Perubahan Renja Thn Berjalan, RKA dan DPA thn Berikut, DPPA tahun berjalan, Renstra	6 Dokumen	75,820,000	76,000,000	Sedang berjalan
IV	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Kab. Sinjai	Adanya RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD yang berbasis Perbup yang sesuai Kalender Perencanaan	100%	1,372,023,000	839,000,000	
19	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Sinjai	Musrenbang RKPD	1 Dokumen	141,725,000	145,000,000	Sedang berjalan

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
20	Monitoring,Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sinjai	Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai , dokumen monitoring pembangunan , dokumen evaluasi pembangunan pedesaan	3 Dokumen	121,231,000	122,000,000	Sedang berjalan
21	Penyelenggaraan forum Gabungan SKPD	Kab. Sinjai	Dokumen berita acara kesepakatan forum gabungan SKPD,bidang sosial,bidang ekonomi dan infrastruktur	1 Dokumen	67,110,000	70,000,000	Sedang berjalan
22	Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Dokumen perubahan RKPD 2018 Kab.Sinjai dan rancangan RKPD 2019 Kab.Sinjai	2 Dokumen	319,940,000	330,000,000	Sedang berjalan
23	Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS 2018 Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS 2019 kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Dokumen kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS kabupaten Sinjai	2 Dokumen	89,445,000	90,000,000	Sedang berjalan
24	Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Kab. Sinjai	Update SIPPD	1 SIM	81,621,000	82,000,000	baru
25	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Kab. Sinjai	Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	1 Dokumen	550,951,000	-	Sedang berjalan
V	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Kab. Sinjai	Meningkatnya kinerja pengembangan wilayah melalui perencanaan tata ruang wilayah	100%	799,912,800	482,000,000	

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
26	Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten Sinjai (BKPRD)	Kab. Sinjai	Laporan Pelaksanaan Pentaaan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang	2 Laporan	69,279,000	75,000,000	baru
27	Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	Kab. Sinjai	KLHS Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	129,280,000	135,000,000	Sedang berjalan
28	Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Laporan kajian revisi kawasan hutan dalam Review RTRWP Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai	1 Laporan	204,926,000	220,000,000	baru
29	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Kab. Sinjai	Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 Dokumen	50,379,800	52,000,000	Sedang berjalan
30	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2032	Kab. Sinjai	Laporan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai	1 Laporan	346,048,000	-	Baru
VI	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	Kab. Sinjai	Terwujudnya kinerja pengembangan kota-kota menengah dan besar		65,196,000	80,000,000	
31	Updating Implementasi Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi kabupaten (SSK) pelaksanaan Program Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Kab. Sinjai	Review dokumen perencanaan bidang sanitasi permukiman	1 Dokumen	35,673,000	45,000,000	Sedang berjalan

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
32	Koordinasi Perencanaan Pokja Air Minum dan Pelembutan Lingkungan (AMPL) Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS III)	Kab. Sinjai	Dokumen perencanaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi	1 Dokumen	29,523,000	35,000,000	Sedang berjalan
VII	Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Kab. Sinjai	Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA	100%	409,853,700	429,000,000	
33	Koordinasi Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah	Kab. Sinjai	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan Praswil	12 Bulan	239,297,700	245,000,000	Sedang berjalan
34	Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kab. Sinjai	pelaksanaan Koordinasi dalam Perencanaan DAK 2018	1 Dokumen	143,470,000	155,000,000	Sedang berjalan
35	Review RPIJM Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Dokumen perencanaan investasi keciptakarya beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakarya kab. Sinjai tahun 2017-2022	1 Dokumen	27,086,000	29,000,000	Sedang berjalan
VIII	Program Perencanaan sosial pemerintahan	Kab. Sinjai	Tingkat keterkoordinasian bidang sosial dan pemerintahan	100%	575,487,100	618,000,000	

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
36	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan	Kab. Sinjai	Dokumen monitoring dan pengendalian, pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12 bulan	94,535,000	100,000,000	Sedang berjalan
37	Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai Tahun 2018	Kab. Sinjai	Sosialisasi dan dokumentasi program Kabupaten Sehat tahun 2018, laporan hasil pelaksanaan program Kabupaten Sehat tahun 2018	1 laporan	115,379,000	125,000,000	Sedang berjalan
38	Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Kab. Sinjai	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan Daerah (LP2KD) dan laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), terbentuknya TKPK kecamatan dan pemetaan kemiskinan	2 Dokumen	127,173,000	135,000,000	Sedang berjalan
39	Perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	Kab. Sinjai	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan dan desa	1 Dokumen	71,465,000	78,000,000	baru
40	Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Kab. Sinjai	Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak.	1 Paket	166,935,100	180,000,000	Sedang berjalan
IX	Program pengembangan Data / Informasi/statistik daerah	Kab. Sinjai	Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan		81,597,000	83,000,000	

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN
			TOLOK UKUR	TARGET			
41	Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kab. Sinjai	Dokumen SIPD dan Profil Daerah	2 Dokumen	81,597,000	83,000,000	Sedang berjalan

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan tahun ke lima Renstra SKPD BAPPEDA tahun 2013 – 2018. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD BAPPEDA tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi jangka menengah BAPPEDA dan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD lingkup Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang ke dalam Renja SKPD BAPPEDA tahun 2018 harus menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan harus melalui proses musyawarah antar pemangku kepentingan, melalui tahapan Forum SKPD dibawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, agar menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai tahun 2018 sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA tahun 2018 pada setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun yang bersumber dari APBN harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan dan melaksanakan dengan sebaik - baiknya.

3. Renja SKPD BAPPEDA tahun 2018 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun RKA - DPA dalam RAPBD tahun 2018.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA tahun 2018, Kepala BAPPEDA wajib melakukan pemantauan melalui tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen Renja SKPD itu sendiri seperti yang tertuang di dalam Permendagri 54 tahun 2010 Lampiran VII.

 **KEPALA BAPPEDA,**
Drs. ANDI ULAM ABUBAKAR, MH
Pangkat : Pembina Tk. I / IV b